

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses transformasi politik yang diawali dengan runtuhnya Rezim Otoriter menuju tatanan politik yang lebih demokratis merupakan suatu perubahan yang sangat mendasar. Demokratisasi dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem dan struktur serta pengelolaan kekuasaan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat, proses tersebut memerlukan waktu yang panjang karena harus dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana, misalnya bagaimana memilih dalam pemilu, sampai menumbuhkan perilaku budaya demokrasi yang menghargai perbedaan, mengembangkan toleransi, bersifat akuntabel, serta dapat menerima kekalahan, tidak perlu sewenang-wenang bagi yang memperoleh kemenangan. Hal ini memerlukan proses panjang, kesabaran, ketekunan serta kerja keras untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik.

Demokrasi konstitusional yang dipraktekkan di Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Dalam konstitusi itu terkandung demokrasi berparadigma Indonesia, yang esensinya diungkapkan dalam sila keempat dari Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan”.¹ Demokrasi berparadigma Indonesia disebut Demokrasi Pancasila yang bertolak dari rasa kolektivitas, rasa

¹ Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hal. 274

kebersamaan dan gotongroyong. Karena itu dalam berbagai dimensi kehidupan, keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

Dalam konteks kehidupan masyarakat desa, asas-asas demokrasi telah lama dipraktekkan. Rasa kebersamaan, solidaritas dan rasa saling percaya dengan sendirinya dapat tercipta dan dipahami. Sistem demokrasi desa adalah warisan langsung dari nenek moyang, sehingga masyarakat merasa memiliki. Rasa ikut memiliki ini merupakan motivasi utama bagi lahirnya rasa keterikatan yang dalam terhadap demokrasi dan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian timbul kesadaran dan kemauan untuk mentaati segala aturan permainan yang telah disepakati bersama di dalam sistem demokrasi itu. Sebagai contoh di desa sering diadakan rembuk desa dengan keputusan diambil secara bersama, pemilihan pimpinan adat yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah-mufakat.

Bila masyarakat secara keseluruhan (termasuk aparat pemerintahan), menyadari akan hal pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat terbuka kemungkinan terciptanya situasi kehidupan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, yang pada gilirannya secara realistis dapat menumbuhkan sikap dan tingkah laku masyarakat yang demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partai politik harus dapat berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi yang menurut Miriam Budiardjo sebagai berikut:

Pertama, Partai politik mempunyai tugas pokok menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. *Kedua*, Partai politik berfungsi mendidik warga Negara menjadi manusia sebagai makhluk sosial. *Ketiga*, Partai politik berfungsi untuk mengajak warga Negara berperan serta (berpartisipasi) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan. *Keempat*, Partai politik berperan dalam mengatur pertikaian politik yang terjadi di masyarakat.²

Lebih lanjut Toto Pandoyo menyatakan bahwa didalam membangun dan membina kehidupan politik rakyat atau bangsa Indonesia, partai politik dapat:

Pertama, Membawa kejalur yang teratur semua aliran atau faham yang hidup di masyarakat. *Kedua*, Perkuat perjuangan bangsa dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. *Ketiga*, Ikut menjamin atau menjaga keamanan masyarakat. *Keempat*, Mendidik rakyat (masyarakat) untuk berkehidupan yang demokratis.³

Upaya demokratisasi yang diperjuangkan partai politik dalam hal ini erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Demokrasi sangat penting bagi keberlanjutan rasa saling mengerti antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu masyarakat harus diberi kesempatan untuk menentukan berbagai hal menyangkut kepentingan mereka, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana hidup yang benar-benar terjamin hak dan kewajiban.

² Miriam Budiardjo, *Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 120.

³ *Ibid.* hal.94.

Orde Baru dengan politik mengambang (*floating mass*) telah mengisolasi partai politik dari rakyat dan menyudutkan rakyat pada posisi jauh dari aktifitas politik praktis. Faktor kebijaksanaan massa mengambang dipedesaan dapat pula dianggap sebagai faktor yang menguntungkan Golkar. Kebijakan ini pada dasarnya hanya memperbolehkan organisasi politik bergerak sampai pada tingkat kecamatan saja. Bagi Golkar keadaan ini tidak terlalu memusingkan, karena aparat pemerintah di pedesaan mempunyai ikatan yang erat dengan Golkar. Melalui aparat-aparat inilah upaya penghimpunan suara di pedesaan dapat berjalan untuk keuntungan Golkar. Selama pemilu pada era orde baru dapat dilihat bahwa di beberapa tempat seringkali kampanye partai politik tidak ada karena sulitnya menghimpun massa. Walaupun ada kegiatan itu pun hanya berupa pemasangan tanda gambar dan peran partai politik sebagai agen sosialisasi politik dalam mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi terhadap masyarakat tidaklah berfungsi sebagai mana mestinya. Partai politik masa mengambang yang sangat merugikan, sudah tidak diperkenankan lagi pada masa sekarang ini.

Dengan diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD maka Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama-sama partai politik lainnya yang banyak jumlahnya dapat menjalankan fungsinya sampai ditingkat desa untuk mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat secara mandiri maupun lewat

sosialisasi yang dilakukan partai politik. Upaya itu dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah sedikit banyak diperlakukan secara demokratis.

Berkaitan dengan partai politik dalam mensosialisasikan politik kepada masyarakat, sangat tampak ketika menjelang pemilu. Ini terjadi sejak masa Orde Baru (meskipun Golkar sangat dominan) hingga era reformasi, dimana masyarakat terlibat dalam kegiatan politik yang dikerahkan oleh partai politik untuk mengikuti atau mendengarkan kampanye baik secara terbuka maupun dialog. Peran tersebut dapat mempengaruhi nilai-nilai, pandangan-pandangan, keyakinan-keyakinan dan cita-cita serta menambah pengetahuan politik masyarakat yang pada gilirannya dapat disampaikan kepada generasi berikutnya. Dengan demikian menunjukkan bahwa partai politik menjalankan fungsinya sebagai agen sosialisasi politik yang pada hakikatnya merupakan proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai politik kedalam lingkungan masyarakat. Karena itu sosialisasi politik erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan sosialisasi politik, Almond dalam Haryanto menyatakan:

“Sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, dan dapat pula memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk penyampaian kebudayaan itu dari generasi tua kepada generasi muda, serta dapat pula merubah kebudayaan politik”.⁴

⁴ Haryanto, “*Sistem Politik Suatu Pengantar*”, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 38.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik erat kaitannya dengan keadaan yang dihadapi masyarakat yang mnunjukkan adanya proses untuk menyampaikan atau mentransmisikan nilai-nilai, sikap-sikap pandangan-pandangan maupun keyakinan-keyakinan politik dari generasi ke generasi.

Dalam proses sosialisasi politik diperlukan sarana-sarana atau agen-agen yang menurut Almond, terdiri dari enam (6) macam yakni: keluarga, sekolah, kelompok bergaul atau bermain, pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik langsung yang didalamnya termasuk partai politik. Partai politik sebagai agen utama berkewajiban dalam mensosialisasikan politik yang demokratis kepada masyarakat.⁵

Keterangan diatas menunjukkan betapa pentingnya lingkungan hidup manusia sebagai makhluk sosial yang pada prinsipnya saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Semakin luas ruang lingkup pergaulan seseorang, akan semakin banyak seseorang memperoleh dan mengetahui segala sesuatu yang ada disekitarnya. Kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang belum pernah diketahui terbuka baginya, sehingga dengan sendirinya sikap, tingkah laku dan perbuatan mencerminkan kebiasaan hidup yang pernah dialami dalam lingkungan pergaulan.

⁵ *Ibid.* hal. 39.

Pada awal sosialisasi yang biasanya terjadi dalam keluarga dimana seseorang anak mempelajari segala sesuatu yang diajarkan orang tuanya menunjukkan bahwa sosialisasi diperkuat oleh kelompok pembanding lainnya. Sebagai contoh seseorang anak bila ia cukup kuat untuk sendiri berjalan dan sudah mulai mengerti berbicara, maka ia cenderung untuk mencari teman sebayanya yang ada disekitar lingkungan tempat tinggalnya. Setelah masuk dunia pendidikan (lingkungan sekolah) rentang pergaulannya semakin luas sehingga secara gradual akan terbentuk kepribadian politik dalam dirinya. Pada perkembangan selanjutnya, dimanapun seseorang berada pada dasarnya nilai-nilai politik tersosialisasikan, yang cukup berpengaruh terhadap pandangan seseorang untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam politik.

Barangkali penting untuk diketahui bahwasannya sosialisasi politik yang terjadi sendirinya dalam lingkungan pergaulan hidup manusia, secara pasti memberi pengaruh yang berbeda antara individu yang satu dengan lainnya, bila dilihat dari sudut pandang pengetahuan politik. Hal ini terjadi karena tidak semua orang tersosialisasi politik sampai pada tingkat partisipasi yang tinggi seperti; menjadi anggota partai politik, menjadi praktisi politik dalam Negara atau mempelajari ilmu politik secara sempurna. Kenyataan dalam contoh tersebut dihadapi hanya bagi mereka yang berminat mengetahui politik secara mendalam baik dari segi praktis maupun teoritis akademis.

Namun pada hakekatnya, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan politik akan selalu tetap dimiliki manusia, meskipun dari segi pengetahuan dianggap kurang memadai. Kenyataan seperti ini, pada umumnya dialami oleh masyarakat desa yang masih sederhana dan jauh dari kehidupan kota yang dianggap lebih maju dan berkembang. Hal inilah yang mempengaruhi kepribadian politik dilihat dari lingkungan yang ditempatinya. Dengan demikian Greenstein menyatakan bahwa kita juga tahu kepribadian cenderung berafiliasi kepada kelompok. Sementara tidak pernah ada kecocokan sempurna antara kepribadian dengan afiliasi, adalah mungkin untuk menyusun kecocokan itu berdasarkan variabel-variabel seperti; kelas sosial, pekerjaan, lokasi wilayah, agama, pendidikan, tempat tinggal, kelompok bahasa (atau suku bangsa) dan sebagainya.⁶

Pentingnya peran politik masyarakat dengan tujuan dapat memberikan control terhadap pemerintah, yang disampaikan melalui organisasi sosial politik seperti partai politik, sehingga berbagai kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan tuntutan dan dukungan terhadap suatu kebijakan sejauh kebijakan yang dikeluarkan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat juga terlibat dalam politik baik menjadi aktivis partai maupun mengikuti kegiatan-kegiatan partai politik seperti mengikuti kampanye pemilu dan ikut serta dalam pemilu. Dengan demikian dapat berarti bahwa dengan

⁶ David E. Apler, *Pengantar Analisis Politik*, CV. Rajawali, Jakarta, 1988, hal. 41.

adanya partisipasi politik masyarakat partai politik dapat memainkan perannya dalam upaya sosialisasi.

Berdasarkan kenyataan yang dihadapi masyarakat, partai politik yang merupakan salah satu agen sosialisasi politik dapat menjalankan fungsinya secara baik. Fungsi yang dimaksudkan adalah mensosialisasikan pandangan-pandangan, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, norma-norma, dan pengetahuan politik kepada masyarakat. Masyarakat diharapkan memahami sikap dan pandangan politik, sehingga dalam proses sosialisasi politik dapat disampaikan atau diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan adanya peran partai politik, masyarakat semakin tersosialisasikan, dimana informasi-informasi politik dapat diperoleh melalui penyuluhan atau kegiatan pertemuan lainnya yang dicanangkan oleh partai politik. Partai politik mampu mendorong masyarakat untuk tetap mempelajari pengetahuan politik baik melalui media massa maupun yang diperoleh dari berbagai kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan (LSM) yang bergerak dalam bidang politik. Dengan demikian peran partai politik dapat bermanfaat bagi masyarakat yang pada akhirnya proses sosialisasi politik dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 partai ini merupakan gabungan dari empat partai keagamaan yaitu, Partai Nahdatul Ulama (PNU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk

penyederhanaan sistem kepartaian dimassa Orde Baru. PPP yang merupakan salah satu partai islam dan partai yang sudah lama ada di Indonesia, PPP memiliki peran yang cukup vital dalam melaksanakan demokratisasi dan sosialisasi politik di dalam kehidupan bernegara. Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT, dan Negara indonesia yang adil dan makmur, sejahtera, bermoral, tegaknya supremasi hukum, yang berlandaskan nilai-nilai keislaman merupakan tujuan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berasaskan islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi pada perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tahun 1984 dalam perjalanannya, kemudian PPP kembali menggunakan asas islam pada pemilu 1999. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai Islam yang sudah ada sejak Orde Baru. Namun, perolehan suara partai itu malah kalah dari partai baru pada Pemilu 1999 dan 2004. Dalam perjalanan pemilu sejak reformasi bergulir Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami kemerosotan suara yang cukup signifikan, dimana setiap pemilu perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selalu menurun pada pemilu 1999 partai ini memperoleh suara 11,3 juta suara, sedang pada pemilu 2004 perolehan suara mengalami penurunan dengan hanya memperoleh 9,2 juta

suara dan bahkan pada pemilu 9 april yang lalu perolehan suara hanya mencapai 5,4%.

Tabel 1.1
Hasil Pemilu Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tahun
1999, 2004, 2009

Perolehan Suara Nasional PPP						Perolehan Suara PPP Kabupaten Wonosobo					
1999	%	2004	%	2009	%	1999	%	2004	%	2009	%
11.329.905	10,7	9.248.764	8,15	5.533.214	5,32	63.5254	15,4	45.435	10,6	37.117	8,6

Dokumentasi DPC Kabupaten Wonosobo

Dengan melihat tabel di atas dapat dilihat bahwa perolehan suara PPP baik di tingkat nasional maupun di kabupaten wonosobo selalu mengalami penurunan dari setiap pemilu, hal ini berpengaruh juga pada perolehan jumlah kursi di parlemen baik itu di pusat maupun di Kabupaten Wonosobo. Penurunan ini lebih disebabkan oleh beberapa faktor baik itu dari dalam tubuh partai itu sendiri seperti kurang maksimalnya sosialisasi politik kepada masyarakat, maupun dari faktor dari luar seperti semakin banyaknya partai-partai baru.

Tabel 1.2
Perbandingan perolehan suara pada pemilu 2004 dan 2009 di Kabupaten
Wonosobo

No	Perolehan suara pemilu 2004		Perolehan suara pemilu 2009	
	Partai politik	Jumlah suara	Partai politik	Jumlah suara
1	PDI Perjuangan	120.579	PDI Perjuangan	81.225
2	PKB	113.302	PKB	61.774
3	Partai Golka	57.622	Partai Golka	43.942
4	PPP	45.138	PAN	37.953
5	PAN	34.548	PPP	37.117
6	Partai Demokrat	13.343	Partai Demokrat	32.216

Dokumentasi DPC Kabupaten Wonosobo

Dari data perbandingan diatas terlihat bahwa perolehan suara PPP dan beberapa partai politik mengalami penurunan yang cukup signifikan dan hanya beberapa partai yang mengalami kenaikan perolehan suara. Dalam hal ini perolehan suara PAN dan partai demokrat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan partai demokrat menjadi salah satu kekuatan politik baru di Indonesia pada umumnya dan dan khususnya di Kabupaten Wonosobo. Dari PPP perolehan suara pada pemilu 2009 ini mengalami penurunan yang cukup banyak sehingga dalam urutan perolehan suara PPP menurun satu tingkat.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai lama yang sudah ada sejak Orde Baru dan berbasis masa islam, walaupun terjadi perpecahan dalam tubuh partai ini sejak pemilu 1999 sampai saat ini tetapi partai ini masih bisa bertahan dalam percaturan politik nasional. Walaupun perolehan suara pada tiap pemilu menurun tetapi PPP masih konsen dengan ciri keislamannya walaupun masyarakat pada saat ini lebih cenderung

memilih partai yang nasionalis. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan partai yang berasaskan islam ini masih dibutuhkan oleh masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Diambilnya penelitian di Wonosobo karena dengan penduduknya yang mayoritas beragama islam dengan fenomena yang hampir sama dengan tingkat nasional dimana perolehan suara PPP di Kabupaten Wonosobo menurun, serta peran aktif PPP di Kabupaten Wonosobo dalam sosialisasi terhadap masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Sosialisasi Politik oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Rangka Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Wonosobo?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi Penghambat dan Pendukung pelaksanaan program tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan PPP dalam sosialisasi politik kepada masyarakat.

2. Untuk mengetahui aktivitas PPP dalam membentuk pola pikir politik pada masyarakat dengan program dan kegiatan yang telah disusun, serta kader partai terlibat langsung dalam kegiatan program sosialisasi Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Wonosobo.

b. Manfaat Penelitian

1. Dengan adanya program sosialisasi yang dilakukan PPP menjelang pemilu, dapat membuka wawasan lebih lanjut tentang pemilu Legislatif 2009, dimana pada pemilu kali ini menggunakan sistim conteng, serta mengantisipasi agar masyarakat tidak Golput pada pemilu 2009.
2. Sebagai sumbangan umum karena dalam penelitian terdapat hal-hal yang ditemui atau sesuatu yang belum dapat diketahui sebelumnya, sehingga dapat menambah wawasan, memperkaya pengetahuan dan pengalaman.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Partai Politik

1.1 Pengertian Partai Politik

Partai politik sudah dikenal oleh bangsa Indonesia setelah bangsa ini merdeka. Dalam ilmu politik, partai politik mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Partai politik awalnya merupakan tuntutan dan keharusan mutlak dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Partai politik eksis secara ideal dalam masyarakat ditujukan untuk mengaktifkan dan memobilisasi massa, mewakili kepentingan umum, memberikan jalan kompromi bagi jalan yang berbeda, serta menyediakan sarana penyambung aspirasi masyarakat dengan pemerintah.

Agar dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai partai politik, maka kiranya diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian partai politik itu sendiri. Menurut Sigmund Neuman partai politik adalah:

“Organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan juga bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dengan semikian partai politik merupakan perantara yang besar, yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas”.⁷

Pengertian partai politik menurut Sigmund Neuman ini lebih melihat partai politik sebagai organisasi yang artikulatif yang memusatkan perhatiannya untuk menguasai pemerintahan dan juga bagaimana mendapatkan dukungan rakyat untuk memainkan aksinya

⁷ Miriam Budiarjo, *Demokrasi Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal.200.

dipercaturan politik masyarakat yang lebih luas. Sedang menurut

Miriam Budiardjo, partai politik adalah:

“Suatu kelompok yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka”.⁸

Melihat pendapat Miriam Budiardjo tersebut, lebih menekankan kepada orientasi bagaimana suatu kelompok yang anggota-anggotanya bisa memperoleh kekuasaan, dengan kekuasaan itu dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mereka kehendaki.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan, orientasi-orientasi yang sama, dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usaha memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan atau mengontrol jalannya roda pemerintahan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi artikulatif yang memiliki basis ideologi dan kepentingan yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama untuk memusatkan perhatiannya terhadap kekuasaan pemerintahan serta berusaha untuk memperoleh kekuasaan politik itu melalui dukungan rakyat dalam

⁸ *Ibid*,hal.201.

rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian jelas bahwa kedudukan partai politik merupakan perantara antara yang memerintah (pemerintah) dengan yang diperintah (rakyat).

1.2 Fungsi Partai Politik

Melalui fungsinya, partai politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

Pertama, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik. Sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Dalam kenyataan di Negara berkembang, perpaduan antara partisipasi dan mobilisasi sering menjadi ciri utama baik untuk waktu yang tak terbatas ataupun temporer. Masalah politik bersifat kompleks, multi dimensional dan berubah-ubah sehingga memerlukan pemikiran yang mendalam, rakyat perlu mendapatkan sosialisasi politik secara kontinue atas dasar nilai-nilai yang dianut untuk memahami segala persoalan dan tantangan terhadap sistem politiknya agar dapat menjawab dan memecahkan secara tepat.⁹ Dalam hal ini terjadi suatu proses dimana seseorang memperoleh pandangan orientasi dan nilai-nilai serta keyakinan-keyakinan dari masyarakat dimana ia berada. Proses tersebut juga

⁹ Rusadi Kentaprawira, *Sistem Politik Di Indonesia*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 1999, hal. 55.

mewariskan norma-norma dan nilai mulai dari satu generasi-kegenerasi berikutnya. Partai politik dapat membina kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara. Persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan dalam suatu Negara cukup kompleks, maka partai politik dituntut untuk berperan lebih aktif dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana sosialisasi politik.

Kedua, partai politik sebagai sarana *rekrutmen* politik. Rekrutmen politik merupakan proses dimana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.¹⁰ Atau biasa dikatakan bahwa rekrutmen politik merupakan seleksi atau pemilihan dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Ketiga, partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik, partai politik sebagai penghubung antara kedua belah pihak, partai politik menyalurkan informasi dari pihak satu ke pihak yang lainnya secara timbal balik. Arus informasi tersebut berjalan dari atas kebawah dan dari bawah keatas. Kedudukan partai dalam hal ini adalah sebagai

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*. PT. Gramedia, Jakarta, 1981 hal.13

jembatan antara yang memerintah (*the rulers*) dengan mereka yang diperintah (*the ruled*).

Keempat, partai politik sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan. Sebagaimana telah disinggung bahwa partai politik sebagai sarana komunikasi politik, maka sudah menjadi semacam kewajiban bagi partai politik untuk mengatur sedemikian rupa sehingga berbagai ragam pendapat, aspirasi maupun kepentingan yang ada di dalam masyarakat itu dapat disalurkan semuanya. Berbagai ragam kepentingan dan pendapat dalam masyarakat yang akan disalurkan oleh partai politik kepada penguasa hal tersebut berupa dukungan atau tuntutan.

Proses merumuskan berbagai pendapat atau aspirasi maupun kepentingan yang ada kepada penguasa dimana artikulasi kepentingan (*interest articulation*). Sedangkan proses penggabungan tuntutan dan dukungan-dukungan yang ada di dalam masyarakat itu disebut dengan agregasi kepentingan (*interest aggregation*).¹¹

Kelima, partai politik sebagai sarana partisipasi politik. Partisipasi politik ialah kegiatan warga Negara bisa dalam mempengaruhi proses dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pimpinanj pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain; membayar pajak, melaksanakan kebijakan umum, mengajukan

¹¹ *Ibid* hal. 14

kritik dan koreksi atas pelaksanaan kebijakan umum, mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, memilih wakil-wakil rakyat dalam pemilihan umum. Partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik.

Keenam, partai politik sebagai pengatur konflik. Konflik yang dimaksud adalah dalam arti luas, mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antara individu-individu atau kelompok dalam masyarakat, setiap warga Negara atau kelompok masyarakat berhak menyampaikan dan memperjuangkan hak dan aspirasinya serta kepentingannya sehingga konflik merupakan gejala yang sukar dihindari.

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokratisasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung berbagai aspirasi dan kepentingan yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan berkompromi oleh para pihak yang berkonflik. Apabila partai politik berkeberatan untuk menyelesaikan konflik, maka fungsi partai politik

bukan mengendalikan konflik melainkan membiarkan konflik itu meluas dimasyarakat.

Ketujuh, partai politik sebagai sarana pembuat kebijakan. Dapat dilaksanakan apabila partai politik yang bersangkutan merupakan partai yang memegang tampuk pemerintahan dan menduduki lembaga perwakilan rakyat secara mayoritas. Apabila partai politik tersebut tidak memegang tampuk pemerintahan dan tidak menduduki badan perwakilan secara mayoritas akan tetapi hanya berkedudukan sebagai partai yang melakukan oposisi, maka partai politik tersebut tidak melakukan fungsinya sebagai sarana untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Sebagaimana dalam Negara yang menganut paham komunis hanya terdapat satu partai saja, yaitu partai komunis karena hanya satu-satunya saja partai politik di Negara tersebut, partai tersebut menjadi partai yang memegang kendali dan mendominasi pemerintahan dan oleh karena itu partai komunis dapat dikatakan partai politik yang berfungsi sebagai sarana pembuat kebijakan.

Delapan, partai politik sebagai sarana untuk mengkritik rezim yang sedang berkuasa. Fungsi partai politik ini pada umumnya berlangsung di Negara yang menganut paham demokrasi, kebebasan untuk mengemukakan pendapat bagi para warga Negara, termasuk

didalamnya menyampaikan kritik pada rezim yang sedang berkuasa diperbolehkan atau diperkenankan.

Pada umumnya partai politik yang melaksanakan fungsinya sebagai sarana untuk mengkritik rezim yang sedang berkuasa biasanya merupakan partai politik yang tidak terlibat dalam pemerintahan yang sedang berkuasa dikarenakan partai tersebut kalah dalam pemilu dan tidak berkoalisi dengan partai lain, mereka (partai politik) lebih memilih sebagai partai oposisi. Pada dasarnya kritik yang dilancarkan dimaksudkan untuk mengontrol roda pemerintahan yang dikendalikan oleh rezim yang sedang berkuasa. Dengan adanya berbagai macam kritik, apalagi kritik tersebut dilancarkan terus-menerus dan ketat, paling tidak akan memaksa rezim yang sedang berkuasa untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan dan tidak bertindak secara sewenang-wenang. Tanpa ada kritik yang mengontrol rezim yang sedang berkuasa maka kemungkinan sekali rezim yang sedang berkuasa akan bertindak secara sewenang-wenang dan cenderung akan menggunakan kekuasaan yang ada pada dirinya.

Dengan demikian peran dan fungsi partai politik sangat mulia bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meskipun partai politik tersebut mempunyai kepentingan sendiri-sendiri tetapi keberadaan mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penyalur suara rakyat. Partai politik akan memainkan peran

membentuk atau menempatkan wakil-wakil rakyat yang duduk di dewan perwakilan rakyat maupun di pemerintahan.

1.3 Peranan Sebagai Agen Sosialisasi Politik

Sebelum penyusun menjelaskan mengenai perana sebagai agen sosialisasi politik, terlebih dahulu penyusun menjelaskan mengenai peranan yakni sebagai berikut, Menurut Soerjono Soekamto peran adalah:

“merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”.¹²

Dari pendapat Soerjono Soekamto dapat dikatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan sehingga apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Kemudian dijelaskan pula bahwa peranan mencakup tiga hal yaitu:

”*Pertama*, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. *Ketiga*, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.¹³

¹² Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 268.

¹³ *Ibid*, hal. 269

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian peranan secara umum adalah ikut serta dalam kegiatan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perubahan-perubahan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menuju pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian peranan adalah suatu aktivitas dinamika dari status atau penggunaan hak dan kewajiban berdasarkan pada suatu tugas tertentu.

¹⁴ *Ibid*, hal. 269

Bila seseorang atau suatu organisasi telah melakukan fungsinya, telah melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau tugas pokoknya maka orang atau organisasi tertentu telah menjalankan perannya.

Sedangkan mengenai sosialisasi politik adalah merupakan suatu proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai politik ke dalam suatu masyarakat. Melalui proses tersebut, seorang individu atau suatu kelompok akan belajar memainkan peranan politik serta terlibat juga penyerapan atau peniruan sikap-sikap politik yang tepat.

Secara jelas dapat dikatakan bahwa, apabila seseorang akan melakukan suatu kegiatan politik (misalnya dalam pemberian dukungan suara dalam pemilu), maka tingkah lakunya akan ditentukan oleh nilai-nilai yang dimiliki (yaitu berupa persepsi politis terhadap wakil yang akan didukungnya). Sedangkan penanaman nilai-nilai itulah yang disebut dengan sosialisasi politik. Menurut Almond sosialisasi yaitu:

“Sosialisasi menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan suatu patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.”¹⁵

¹⁵ Haryanto, *Sistem Politik Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 36.

Melihat pendapat Almond tersebut, dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya berdasarkan patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan yang diperoleh sehingga mempengaruhi sikap dan pola tingkah laku politik pada generasi berikutnya.

Sementara itu Dennis Kavanagh juga mengemukakan pendapatnya bahwa “sosialisasi politik merupakan suatu proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.”¹⁶

Berdasarkan pendapat Kavanagh dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik tertuju pada proses seseorang mempelajari politik, dan dalam proses tersebut pandangan tentang politik tumbuh dan berkembang pada gilirannya mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya.

Sosialisasi politik adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Atau seperti yang dijelaskan oleh Alex Thio, sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu memperoleh pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, dan sikap politik.

¹⁶ *Ibid*, hal. 37

Di dalam kehidupan politik, seperti halnya wilayah-wilayah kehidupan lainnya, sosialisasi merupakan kunci bagi perilaku. Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Dalam hal ini sosialisasi merupakan merupakan suatu proses *pedagogis* (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik. Proses ini melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun generasi muda. Proses ini dimulai sejak dini, ketika seorang anak masih kecil, dimana keluarga berperan sebagai pelaku utama dalam sosialisasi. Selain keluarga, sekolah (pendidikan), kelompok kerja, kelompok sebaya, kelompok agama, dan media massa berperan sebagai agen atau pelaku sosialisasi politik.¹⁷

Tujuan sosialisasi politik dimaksudkan sebagai proses menanamkan rasa terikat (*attachment*) pada suatu sistem politik. Apabila keterkaitan itu menjadi berakar sangat kuat atau terlembaga, dikatakan bahwa sistem politiknya memiliki legitimasi yang tinggi. Dengan demikian, sosialisasi secara efektif diciptakan dan dialihkan

¹⁷ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 135-136

(diwariskan) kepada generasi lainnya dalam suatu sistem politik, atau disebut sebagai transmisi kebudayaan.¹⁸

Dari pengertian mengenai sosialisasi bersifat pasif yaitu menerima nilai-nilai politik, sekaligus bersifat aktif, mengembangkan dirinya agar dapat berpartisipasi dalam sistem politik yang berlaku, dimana ia hidup di dalamnya. Di dalam proses sosialisasi tersebut, dilaksanakan dalam waktu tidak terbatas, terus menerus dari generasi ke generasi berikutnya serta mempunyai pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap individu dimasa dewasanya. Dalam proses sosialisasi, ada dua hal yang perlu diperhatikan; *pertama*, sosialisasi politik itu berjalan secara terus menerus dalam hidup seseorang. *Kedua*, pengaruh sosialisasi politik bisa langsung, yaitu akibat faktor-faktor latar belakang kehidupan seseorang itu, terutama sangat kuat berlangsung dimasa kanak-kanak, sejalan dengan perkembangannya sikap menurut atau sikap pembangkang. Sikap-sikap ini akan mempengaruhi terhadap sesama warga Negara.

Untuk mempersempit ruang lingkup kajiannya maka secara spesifik yang dipaparkan adalah peranan partai politik sebagai agen sosialisasi politik. Parpol memang berperan aktif dalam kegiatan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Peran

¹⁸ Mohtar Mas'ood dan Colin Mac Andrewd, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University. Yogyakarta. 1974, hal. 20.

tersebut biasanya dirasakan oleh masyarakat terutama menjelang pemilu ketika melakukan kampanye atau propaganda. Akan tetapi berkaitan dengan tema yang diangkat penyusun, maka sebelum masyarakat berpartisipasi dalam politik, sosialisasi politik telah berjalan dalam kehidupan seseorang.

Sebagai suatu kajian reflektif dapat dikatakan bahwa partai politik harus mampu mensosialisasikan ideologi partai, sehingga nilai-nilai, cita-cita, tingkah laku dan sikap mampu mempengaruhi pandangan masyarakat. Kendati masyarakat itu sudah tersosialisasi politik melalui agen-agen lainnya, semenjak seseorang masih kanak-kanak, perlu adanya perluasan pengetahuan politik secara memadai. Ini barangkali cukup memberi arti bagi terbentuknya obyektivitas sikap dan pandangan politik masyarakat secara individual yang pada gilirannya bermanfaat bagi kemajuan praktek dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu partai politik harus berperan sebagai sarana sosialisasi politik yang merupakan proses dimana seseorang memperoleh pandangan orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat dimanapun dia berada harus dapat memberikan penyuluhan. Kursus-kursus mengenai pendidikan partai untuk menanamkan nilai-nilai ideologi dan loyalitas kepada Negara dan partai. Disamping itu partai politik juga berfungsi sebagai sarana pengatur konflik. Dalam Negara

demokratis yang masyarakatnya bersifat terbuka, sering mengalami persaingan pendapat yang sifatnya perorangan, kelompok, etnis, agama, golongan, status social ekonomi dan lain-lain. Pertikaian semacam itu dapat diatasi dengan bantuan parpol untuk menekan akibat-akibat negatif.

Dalam lingkungan kehidupan masyarakat, parpol memang selalu dihadapkan dengan berbagai masalah antara lain; kemiskinan, keterbatasan kesempatan kerja, pembagian pendapatan yang timpang, tingkat buta huruf yang tinggi, tidak ada usaha masyarakat untuk bersaing dibidang ekonomi, transportasi dan akses komunikasi tidak memadai dan masyarakat sulit mengembangkan intelektual dalam berfikir kritis dan logis. Masalah-masalah tersebut sangat mempengaruhi kinerja parpol sehingga peran yang dimainkan kurang efektif dan efisien.

Atas dasar fungsi-fungsi tersebut diatas, diharapkan agar parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat mempertahankan integritas dan memupuk identitas nasional karena Negara baru bisa dihadapkan dengan upaya mengintegritaskan berbagai golongan suku, bangsa, agama yang bercorak sosialnya berbeda yang dapat membentuk suatu pandangan hidup menjadi satu bangsa. Masyarakat harus diberi politik yang obyektif demi menjaga keutuhan bangsa.

Parpol harus menanamkan kesadaran bagi masyarakat tentang dampak depatilisasi masa lalu yang berorientasi pada modus pengalihan masyarakat dari politik yang mengakibatkan kurang tanggapnya masyarakat terhadap masalah-masalah politik. Untuk itu diera keterbukaan ini parpol harus mampu memberikan pelajaran politik kepada masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, partai dengan pengetahuan politik yang diketahuinya berusaha untuk membendung campur tangan militer dalam politik, sehingga menutup kecenderungan praktek politik represif yang berdampak terbentuknya kesadaran masyarakat tentang cara-cara politik yang sehat, positif dan demokratis.

Oleh karena partai politik merupakan agen sosialisasi politik, maka nilai-nilai, pandangan-pandangan, orientasi-orientasi, norma-norma dapat diwariskan dari generasi ini adalah suatu proses dimana seseorang mulai dari masa kecil dan diselenggarakan melalui berbagai lembaga dan kegiatan, seperti pendidikan formal dan informal, media massa seperti radio, televisi dan parpol. Melalui kursus-kursus pendidikan partai menanamkan nilai-nilai ideologi dan loyalitas kepada Negara dan partai. Terutama dalam Negara berkembang yang

heterogen sifatnya, parpol dapat membantu peningkatan identitas nasional dan pemupukan integritas nasional.¹⁹

Dalam sistem kenegaraan yang mencerminkan cara berpolitik yang sehat harus mengutamakan kekuatan orang sipil sehingga melalui parpol, masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya mengenai seluk beluk politik dalam Negara atau paling tidak bisa mengetahui keadaan politik didaerahnya. Parpol setidaknya berusaha untuk memotivasi masyarakat menyumbang pengetahuan politik sehingga sikap-sikap, tingkah laku, dan pandangan politik cukup memberi arti bagi peningkatan partisipasi politik masyarakat. Kemajuan pemahaman mengenai nilai-nilai politik, sangat bermanfaat bagi penilaian praktek-praktek politik dalam kehidupan bermasyarakat. Segala seluk beluk politik yang tengah terjadi dapat dipahami sebagai perubahan untuk mencari kesempurnaan dalam pemerintahan. Ini bukan berarti bahwa fenomena politik dapat dijadikan hal yang akan membawa dampak negatif. Akan tetapi dapat dipandang sebagai suatu perbaikan keadaan politik Negara kearah yang lebih baik. Hal ini sangat diperlukan, oleh karena bermanfaat bagi kemajuan-kemajuan pembangunan pada umumnya dan secara khusus demi terbentuknya pandangan atau pikiran politik masyarakat yang rasional, yang pada gilirannya dapat mewariskan kepada generasi berikutnya.

¹⁹ *Ibid*, Budiharjo, 1994, hal. 202

2. Sosialisasi Politik

2.1 Menanamkan Pengetahuan Politik Kepada Masyarakat

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan kebutuhan asasi manusia, dimanapun, dengan membawa karakter dan fitrah sosial. Dengan kehidupan bermasyarakat ini, manusia dapat menjalani kehidupan dengan saling menolong. Tangan yang diatas membantu yang dibawah, yang kuat membantu yang lemah, pemimpin membimbing bawahannya, penguasa melindungi rakyat dan seterusnya. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, praktek saling bantu-membantu antar sesama dapat terwujud. Hanya saja, sering dalam kenyataan muncul praktek-praktek moral yang tidak terpuji yang menjadikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini tidak sebagaimana yang diharapkan. Ada praktek perebutan kekuasaan, penindasan terhadap rakyat, persaingan antar pemimpin. Konflik horizontal dan sebagainya, yang menjadikan institusi sosial berubah menjadi “arena pertarungan sengit” segelintir para penguasa.

Karena fenomena yang demikian, praktek politik para penguasa menjadi bahan pembicaraan yang tidak ada habisnya. Tidak hanya oleh para pelakunya tetapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam tataran diskusi ilmiah politik itu sendiri dipersepsikan secara beragam oleh pakar. Politik dapat dimaknai sebagai aktifitas yang menyentuh berbagai sektor kehidupan untuk

mengantarkan rakyat menuju kesejahteraan hidup, politik juga dapat diartikan sebagai aktifitas yang khusus berhubungan dengan kekuatan dan kekuasaan.²⁰ Dalam hal ini makna kedualah yang banyak dianut, setidaknya dalam praktek nyata berpolitik, aroma persaingan elit politik dalam perebutan pengaruh dan kekuasaan jauh lebih menonjol dibandingkan usaha secara serius untuk mengurus rakyat yang telah mengamanahkan kepemimpinannya kepada mereka. Pada Negara maju praktek ini relatif lebih terkenal, karena mayoritas dengan basis pendidikan dan kehidupan yang relatif mapan, mampu memberi kontrol secara efektif. Partisipasi politik rakyat relatif tinggi sehingga kesewenang-wenangan penguasa bisa ditekan oleh mereka secara bersama-sama. Beda dengan halnya dengan Negara berkembang bahkan Negara miskin yang rakyatnya masih berkebutuhan dengan persoalan kebutuhan primer kehidupannya, ditambah dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, praktek-praktek penyelewengan kekuasaan masih sangat rentan. Itu disebabkan rakyat belum sempat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara, sehingga kontrolpun belum memadai.

Dalam kontek negara Indonesia, kita sungguh berhadapan dengan realitas sosial politik yang sangat berat. Penindasan kekuasaan yang telah berlangsung begitu lama telah memandulkan gairah sebagai

²⁰ Utsman Abdul Mu'iz. Ruslan, *Pendidikan Politik Era Intermedia*, 2000, hal, 5.

masyarakat untuk berpartisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disisi lain menimbulkan kekecewaan dan kemarahan yang terpendam dalam sebagian masyarakat, yang pada gilirannya akan menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Dalam kenyataannya, warna dan gaya kepemimpinan dalam institusi partai-partai sedikit banyak terpengaruh oleh gaya kepemimpinan besar yang sekian lama pernah menindasnya. Sementara masyarakat banyak yang menjadi obyek politik belum mendapatkan proses pendidikan politik yang memadai dari partai politik maupun tokoh masyarakat dan juga pemimpinnya, untuk dapat terlibat secara aktif dan benar. Dengan demikian sesungguhnya masyarakat sangat membutuhkan proses penyadaran politik, peningkatan wawasan, dan penajaman kepekaan politik yang terprogram dengan cara memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat tidak hanya sebatas pada saat momen-momen tertentu saja seperti menjelang pilkada, menjelang kampanye pemilu, seharusnya berkelanjutan agar senantiasa dapat melakukan partisipasi politik yang aktif dan benar.

2.2 Membentuk Persepsi Politik Kepada Masyarakat

Persepsi adalah suatu proses yang mendasari sikap seseorang dalam menentukan katagori terhadap obyek yang menjadi tujuan dari pengamatan. Mar'at juga menyebutkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

Pertama, faktor personal individu yang terdiri dari pengetahuan, penelitian, perhatian dan harapan individu tentang suatu obyek. *Kedua*, faktor sosial budaya berisi nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, seperti adapt istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan perilaku-perilaku sosial masyarakat lainnya yang mempengaruhi oleh strata sosial masyarakat dan kondisi sosial masyarakat. *Ketiga*, faktor lingkungan fisik yang meliputi kondisi geografis dan keadaan fisik masyarakat.²¹

Persepsi masing-masing orang terhadap suatu obyek yang sama bisa berbeda-beda dengan fikiran orang lain. Ada dua pandangan tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi, yang pertama adalah orang mempersepsikan sesuatu secara keseluruhan, dan yang kedua dimana orang mempersepsikan sesuatu tergantung dari karakteristik orang itu secara fungsional, yaitu meliputi kebutuhan, pengalaman dan hal-hal yang bersifat personal. Obyek yang mendapat tekanan merupakan obyek yang berkaitan dengan tujuan individu.

Sedangkan mengenai persepsi politik masyarakat bertalian dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan-keterangan atau informasi-informasi dari sesuatu hal maupun gambaran tentang obyek politik yang bersifat fisik dan nyata.²²

Dalam ilmu politik terdapat dua model pembentukan persepsi politik yaitu:

Pertama, model sosiologi dari madzab Colombia yang melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan kelompok yang bersifat vertical dari tingkat terbawah sampai pada tingkat yang teratas.

²¹ Ahmad Mar'at, *Pengantar Psikologi*. Tiara, Jakarta, 1984, hal. 178.

²² Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Umum*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, hal. 200.

Menurut paham ini, kelompok-kelompok berbeda tersebutlah yang membentuk persepsi, sikap, keyakinan dan sikap politik dari masing-masing individu. Oleh sebab itu, segala kelakuan politik masyarakat merupakan bentuk dari masing-masing sifat status sosial mereka seperti tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, status pekerjaan, dan lain-lain. *Kedua*, model sosiopsikologis yang merupakan pengembangan dari madzab Michigan yang menyatakan bahwa masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam suatu proses pemilihan umum (politik) lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sendiri, yang kesemuanya itu sebenarnya merupakan akibat dari hasil proses sosialisasi politik. Melalui proses sosialisasi inilah akan berkembang suatu partai, yang berwujud simpati terhadap partai politik yang bersangkutan. Ikatan psikologis inilah yang dalam ilmu politik disebut dengan istilah identifikasi kepartaian. Identifikasi kepartaian menunjuk pada perasaan individu terhadap partai, dimana ikatan ini adalah juga merupakan ikatan yang bersifat psikologis yang dapat muncul tanpa harus menjadi anggota resmi partai politik tersebut dan bahkan tanpa suatu konsistensi untuk mendukung secara resmi suatu partai.²³

Dalam kenyataannya kedua model tersebut sebenarnya saling melengkapi sesuai dengan *political culture* (budaya politik) yang berkembang dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia pendekatan model kedua sekarang ini tampak lebih dominan, hal ini disebabkan euphoria reformasi yang menyebabkan kran demokrasi terbuka lebar sehingga aktifitas politik bisa dilaksanakan sampai pada tingkat masyarakat terbawah.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa pengertian persepsi masyarakat adalah suatu pandangan, gagasan dan pendapat sebagai hasil pengamatan dan pemikiran seseorang di dalam

²³ *Ibid.* hal, 201.

suatu masyarakat dalam memberikan sikap dan orientasi terhadap fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat tersebut sehingga terbentuk suatu kumpulan persepsi individu-individu di dalam suatu masyarakat terhadap fenomena yang terjadi dan dapat dianggap sebagai persepsi masyarakat.

Persepsi masyarakat merupakan aktualisasi kesan yang didapat masyarakat terhadap fenomena sosial tertentu yang terjadi disekitarnya. Sebagaimana persepsi individu, persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor personal individu-individu anggota masyarakat yang terdiri dari pengetahuan, penilaian, perhatian dan harapan individu tentang suatu obyek, faktor sosial budaya yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, seperti adapt istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan perilaku-perilaku sosial masyarakat lainnya yang dipengaruhi oleh strata sosial masyarakat dan kondisi sosial masyarakat serta faktor lingkungan fisik yang meliputi kondisi geografis dan keadaan fisik masyarakat.

Dalam penelitian ini, persepsi masyarakat terhadap peran PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dalam sosialisasi politik terhadap masyarakat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat serta tingkat pengetahuan, tingkat perhatian, tingkat penilaian dan tingkat harapan masyarakat terhadap peran PPP dalam mensosialisasikan politik terhadap masyarakat.

2.3. Membentuk Sikap-sikap Politik Kepada Masyarakat

Pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman yang telah lalu maupun yang sedang dialami tentunya memiliki pengaruh pada penghayatan kita terhadap suatu obyek tertentu, pembentukan kesan atau tanggapan terhadap obyek tertentu, pembentukan kesan atau tanggapan terhadap obyek merupakan proses yang kompleks dalam diri individu yang melibatkan individu yang bersangkutan, situasi dimana tanggapan tersebut terbentuk dan ciri-ciri obyektif yang dimiliki stimulus. Oleh karena itu sebagai dasar pembentukan sikap maka pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat karena sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional dimana penghayatan akan pengalaman akan mendalam dan lebih lama membekas. Kedua, Kebudayaan. Kebudayaan yang berkembang dimana seseorang hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap. Sebagai contoh, misalnya sikap orang desa dengan orang kota terhadap kebebasan dalam pergaulan antara muda-mudi barangkali memiliki perbedaan yang amat tajam. Orang kota cenderung memiliki sikap yang lebih permisif. Tanpa kita sadari bersama, kebudayaan ternyata telah menanamkan pengaruh yang kuat terhadap sikap seseorang terhadap berbagai macam hal. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota

masyarakat, karena kebudayaan tersebut memberi corak pengalaman-pengalaman individu yang menjadi anggotanya. Ketiga, orang lain yang dianggap penting Seseorang yang dianggap penting adalah orang yang kita harapkan persetujuannya bagi setiap gerak tingkah laku kita dan opini kita, orang yang tidak ingin kita kecewakan dan orang yang berarti khusus. Mereka akan mempengaruhi pembentukan sikap seseorang terhadap sesuatu hal. Pada umumnya individu cenderung memiliki sikap yang searah (konformis) dengan orang yang dianggap penting. Hal ini disebabkan karena adanya motivasi dan keinginan untuk menghindari konflik terhadap orang yang dianggap penting tersebut. Keempat, media massa. Merupakan salah satu bentuk media atau sarana komunikasi yang memiliki bentuk media cetak (surat kabar, majalah, dll) dan media elektronik (radio, televisi, dll). Media massa memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dalam menyampaikan informasi, media massa membawa pula pesan-pesan sugestif yang disampaikan apabila cukup kuat maka akan memberi dasar efektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuk suatu sikap tertentu. Kelima, institusi pendidikan dan agama. Lembaga pendidikan ataupun agama sebagai suatu sistem ternyata memiliki pengaruh dalam membentuk sikap seseorang. Hal ini disebabkan karena keduanya meletakkan dasr

pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman baik dan buruk, salah dan benar, garis pemisah antara yang tidak boleh dan yang boleh, semuanya merupakan hal-hal yang diperoleh dari pendidikan dan keagamaan. Konsep moral dan ajaran agama pada hakikatnya amat menentukan sistem kepercayaan sehingga pada akhirnya konsep tersebut akan ikut berperan dalam menentukan sikap seseorang terhadap sesuatu hal.²⁴

Dari berbagai uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa sikap dibentuk oleh pengetahuan, penilaian dan harapan seseorang terhadap suatu obyek serta dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat, media massa dan institusi pendidikan dan agama. Partai politik adalah pembela utama kebudayaan politik. Mereka mensosialisasikan berbagai sektor penduduk yang berbeda-beda. Kegiatan kampanye dan pencarian suara dalam pemilihan akan mempengaruhi perilaku para warga, oleh karena itu di dalam pengertian ini partai merupakan suatu struktur berbagai kesempatan.

²⁴ Fadillah Putra, *Partai Politik Dan Kebijakan Umum*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, hal. 214.

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali, baik itu pemilu legislatif untuk memilih anggota legislatif maupun pemilu seperti pilkada dan sebagainya. Pemilu di Indonesia sejak reformasi bergulir diikuti oleh banyak partai karena menggunakan sistem multipartai. Dalam perjalanan proses pemilu pada pemilu 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 9 april menggunakan cara yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya dalam memilih partai maupun calon legislatif, dimana pemilu yang pernah dilaksanakan di indonesia yaitu dengan cara mencoblos sedangkan pada pemilu legislatif 2009 memilih calon legislatif dengan cara mencontreng. Dengan adanya perubahan mekanisme pemilihan dari mencoblos menjadi mencontreng banyak menimbulkan pro dan kontra dimana masyarakat harus mengubah kebiasaan dimana pada pemilu-pemilu yang sudah dilakukan dengan mencoblos kemudian sekarang diganti dengan mencontreng. Terlepas dari perubahan mekanisme memilih, yang terpenting adalah dengan adanya pemilu yang dilakukan setiap lima tahun sekali bisa memberikan dampak yang positif bagi bangsa ini, dengan adanya pemilu harus membawa perubahan dan harus bisa membawa negara ini kearah yang lebih baik. Menurut Aurel Croissant (2002) mengemukakan ada tiga pokok pemilu. *Pertama*, fungsi keterwakilan (*representativeness*), dalam arti kelompok-kelompok masyarakat memiliki perwakilan ditinjau dari aspek geografis, fungsional

dan deskriptif. *Kedua*, fungsi integrasi, dalam arti terciptanya penerimaan partai terhadap partai lain dan masyarakat terhadap partai. *Ketiga*, fungsi mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*).²⁵

Dari fungsi pemilu diatas dapat dijelaskan bahwa pemilu merupakan komponen yang harus ada dalam negara demokrasi, dimana pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk diparlemen dan dapat menjalankan amanah dari rakyat. Yang terpenting lagi yaitu dengan adanya pemilu dan masyarakat telah memilih wakilnya yang duduk di parlemen dapat berdampak positif bagi masyarakat yaitu bisa merubah masyarakat menjadi sejahtera. Fenomena pemilu yang selalu memunculkan banyak partai sejak memakai sistem multi partai menyebabkan masyarakat semakin acuh atau tidak menganggap penting lagi memilih dalam pemilu sehingga orang yang tidak memilih atau golput selalu ada baik itu dipemilu legislatif maupun di pilkada. Dengan menganut sistem kepartaian yang multi partai, partai-partai politik dengan mudahnya lahir kemudian tidak berapa lama mati karena tidak memperoleh suara yang signifikan. Ini terjadi karena kapasitas sistem pemilu lemah dalam memantapkan sistem kepartaian.

²⁵ Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Semarang, Tahun 2008, hal:4-5.

E. Definisi Konseptual

Konsep merupakan generalisasi dari seluruh fenomena tertentu sehingga dapat dipahami dan dimengerti, tidak terjadi kesalah-pahaman arti dari masing-masing variabel.

1. Partai Politik adalah suatu organisasi artikulatif yang anggota-anggotanya mempunyai cita-cita untuk memusatkan perhatiannya terhadap kekuasaan pemerintahan serta berusaha untuk memperoleh kekuasaan politik itu melalui dukungan rakyat dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dititipkan.
2. Sosialisasi politik masyarakat adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku politik suatu masyarakat yang kemudian dapat diwariskan kepada generasi kegenerasi berikutnya.

F. Definisi Operasional

Pada bagian ini dijelaskan beberapa indikator sebagai tolak ukur untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini, adapun indikator tersebut sebagai berikut:

1. Sosialisasi Politik oleh Partai Persatuan Pembangunan:
 - a. Pembinaan terhadap pengurus dan kader partai
 1. Konsolidasi dan koordinasi internal partai
 2. Pelatihan calon legislatif

3. Pelatihan juru kampanye
 4. Pelatihan rekrutmen masa
 5. Penataran saksi
- b.** Penyuluhan terhadap masyarakat tentang tata cara pemilu legislatif 2009
- 2.** Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung dalam Sosialisasi Politik Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Wonosobo.
- a. Faktor Penghambat
 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh PPP di Kabupaten Wonosobo
 2. Kurang maksimalnya kinerja mesin politik
 3. Kurangnya sumber dana
 - b. Faktor Pendukung
 1. PPP Kabupaten Wonosobo mempunyai organisasi sayap pendukung seperti GPK, AMK
 2. Banyak kiai-kiai yang menjadi pendukung PPP

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara utama dalam melakukan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara menentukan terlebih dahulu jenis penelitian, populasi, dan sample, serta jenis data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong:²⁶

”Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis cara kualifikasi lainnya. Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses dari pada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses”

Metodologi deskripsi adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁷ Hal ini juga disebabkan karena metode penelitian kualitatif deskriptif memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual, dan ia merupakan representatif obyektif terhadap fenomena yang tanggap.²⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi obyek dari penelitian adalah DPC PPP Kabupaten Wonosobo, karena PPP masih mempunyai pendukung walaupun muncul banyak partai-partai baru.

3. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang ada pada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka unit analisis pada penelitian ini difokuskan

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, 2001, hal. 135.

²⁷ Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. Hal. 6.

²⁸ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1985. Hal, 141.

pada sosialisasi politik PPP dalam rangka pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Wonosobo.

4. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul Sosialisasi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam rangka pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Wonosobo adalah:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh langsung dari sumber data berupa keterangan-keterangan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Adalah data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. Data sekunder merupakan data-data kepustakaan yang relevan yang bersumber dari buku-buku literatur, dokumentasi, dan sebagainya.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang lengkap, akurat serta ilmiah penyusun menggunakan beberapa metode, antara lain:

a. Observasi

Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan dilapangan.

b. Interview / Wawancara

Yaitu dengan cara melakukan komunikasi aktif dengan pengurus serta dengan narasumber yang terkait langsung dengan aktifitas PPP dalam sosialisasi politik. Adapun pihak yang di wawancara antara lain dengan ketua DPC PPP Kabupaten Wonosobo Bpk M. Asnawi, SE Sekretaris DPC Bpk Drs. Munir, serta jajaran yang ada dalam struktur kepengurusan partai. Dengan wawancara peneliti bisa mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh politisi dan pengurus partai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat yang berhubungan dengan penelitian atau Koran, majalah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian.²⁹ Dokumentasi yang diambil dari arsip-arsip mengenai program yang telah dilaksanakan oleh DPC PPP.

Adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan sumber data yang ada di kantor DPC, karena metode ini sangat berguna membantu interview dan observasi. Selain itu dengan metode

²⁹ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hal 80

dokumentasi ini, akan diperoleh data yang sebenarnya tentang masalah yang ada hubungannya dengan obyek yang akan diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak dianalisis menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan diuraikan secara deskriptif, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan dan kepentingan penelitian. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis data secara sistematis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki tanpa menggunakan hitungan statistik. Jadi dengan analisis data, maka akan diperoleh gambaran secara deskriptif tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian sehingga akan memberi jawaban atas masalah yang akan diteliti, selanjutnya data tersebut dapat dianalisis dan diinterpretasikan kebenarannya. Adapun langkah yang perlu dilakukan dalam proses analisis data Moleong adalah analisis data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.³⁰

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal,